

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN – DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

2008

PERMENHUB NO. 63 TAHUN 2008, 27 HLM.

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

ABSTRAK - Bahwa dengan adanya berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan perlu diatur kembali dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PERPRES No. 9 Tahun 2003; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan meliputi tujuan dan ruang lingkup, pengangkatan dan pemberhentian calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan, pelantikan, pengukuhan dan penandatanganan surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan menjalankan tugas jabatan, pemindahan pegawai negeri sipil, pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari jabatan fungsional, sumpah/janji pegawai negeri sipil, penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil, penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, cuti pegawai negeri, ijin perjalanan dinas ke luar negeri, pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun, pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi, kartu pegawai dan kartu istri/suami, kenaikan gaji berkala, daftar penerima calon pensiun, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil, usul mutasi di bidang kepegawaian, dan penandatanganan salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2008.

Lampiran : 0 hlm.